



Judul : Sebulan Jelang Idul Fitri Pembiayaan Naik, Awas Kredit Macet
Tanggal : Selasa, 19 Maret 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Sebulan Jelang Idul Fitri Pembiayaan Naik, Awas Kredit Macet

SAAT Ramadan dan jelang Idul Fitri, kebutuhan pembiayaan masyarakat akan melonjak. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peningkatan ini terlihat dari tren data pembiayaan selama lima tahun terakhir yang selalu meningkat satu bulan sebelum hari Raya Idul Fitri.

Adapun pembiayaan paling besar disumbang oleh kredit kendaraan bermotor, untuk keperluan mudik atau berpergian selama libur lebaran. Selain sektor multifinance, OJK juga memperkirakan pembiayaan melalui platform 'Buy Now Pay Later' akan mengalami tren kenaikan utamanya untuk membeli kebutuhan Ramadan dan tiket mudik Lebaran.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Amir Uskara mengatakan, industri pembiayaan memang harus bisa *survive* tapi masyarakat juga tetap terlindungi.

"Kami tidak ingin masyarakat karena terdesak, kemudian mengambil, padahal tidak sesuai dengan kemampuan pengembalian. Ini semua kami jaga," ujar Amir.

Khususnya aspek kredit kendaraan bermotor, Amir mengingatkan perusahaan pembiayaan tetap berhati-hati dalam memberikan kredit. Agar pertumbuhan piutang tidak diiringi dengan kenaikan risiko kredit.

Terlebih dengan regulasi yang ada saat ini, masyarakat dengan sangat mudah mendapatkan cicilan dari Bank Indonesia (BI).

"Saya kira itu rutin biasanya menjelang Lebaran biasanya ada (kendaraan bermotor). Itu juga bisa menjadi salah satu sumber masalah buat pembiayaan," pesannya.

Sebelumnya, OJK memproyeksikan terjadi kenaikan permintaan pembiayaan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk persiapan

puasa dan lebaran, pembelian tiket mudik serta pembelian kendaraan bermotor R2 dan R4.

OJK memproyeksikan pada Maret 2024 pertumbuhan piutang pembiayaan berada pada kisaran 11 persen hingga 13 persen. Hal ini menunjukkan Ramadan memiliki dampak cukup signifikan dengan penyaluran pembiayaan perusahaan pembiayaan.

Sementara, anggota Komisi XI DPR Muhidin Mohamad Said mengatakan, asosiasi perusahaan pembiayaan bersama OJK mesti memitigasi secara ketat untuk menghindari kenaikan kasus gagal bayar.

"Mungkin karena kredit mudah didapat, konsumen tanpa melihat kemampuannya memaksakan diri untuk mengambil. Jadi pada saat pengembalian terjadi masalah, maka pihak pembiayaan tentu tidak mau rugi. Nah, ini yang jadi problem," ujar Muhidin.

Karena itu, anggota Fraksi Partai Golkar tersebut mengimbau OJK harus mencari jalan tengah suatu penataan pola pembiayaan yang sehat. Salah satunya, usul Muhidin, dengan cara persyaratan kredit yang harus semakin diperketat.

"Ini harus dicari suatu pola yang bagus, mungkin ada batasan, harus dilihat apakah layak diberikan pinjaman atau tidak, kalau tidak ya saya kira dibatasi. Kalau di luar negeri kita lihat permintaan dan penawaran itu seimbang. Jangan sampai meminjam itu gampang, mengembalikannya itu susah," tandasnya.

Muhidin mendorong OJK meningkatkan edukasi dan lebih selektif terhadap calon debitur pada saat melakukan verifikasi data peminjam. Tujuannya, melihat kelayakan pinjaman agar tidak terjadi risiko gagal bayar serta menghindari potensi benturan di lapangan antara pihak kreditur dengan konsumen. ■ KAL